

**IMPLEMENTASI PROGRAM FORCLIME DALAM MENURUNKAN
DEFORESTASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019-2021**

**Oleh: Anisa Siti Nurhasanah
Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, M.A**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Hutan di Indonesia memiliki potensi flora, fauna, ekosistem dan hutan tropis. Potensi hutan yang besar ini, ternyata masih kurang diperhatikan oleh Indonesia. Setidaknya 286 juta hektar hutan Indonesia mengalami deforestasi sejak tahun 2001 hingga 2021. Pada periode tersebut Kalimantan Barat menyumbang 40% deforestasi di Indonesia. Deforestasi tersebut dapat memicu perubahan iklim dan mengancam eksistensi dari keanekaragaman hayati dan masyarakat rural (*indigenous people*). Kekhawatiran terhadap deforestasi tersebut membutuhkan penanganan yang strategis. Pelaksanaan Program FORCLIME menjadi jawaban untuk pelaksanaan Mitigasi REDD+ di Indonesia. Penelitian ini membahas Bagaimana Implementasi dari Program FORCLIME dalam Menangani Deforestasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Tahun 2019-2021?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dokumen (*document analysis*) yang bersumber dari buku, jurnal internasional dan nasional, dokumen resmi pemerintah dan non-pemerintah, serta berita maupun *press release* kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program FORCLIME dilaksanakan melalui tiga tingkatan. Pada Level nasional strategi berfokus pada kebijakan, strategi dan rencana kelembagaan pengelolaan hutan. Pada tingkat regional memberikan saran terkait rencana, REDD+ readlines, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan komunitas melalui DPMU. Pada tingkat tapak/ lokal, merupakan kegiatan implementasi *Demonstration Area* (DA). Kegiatan pada DA berupa konservasi, manajemen penggunaan lahan, peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan dan *demonstration plot agroforestry*.

Kata Kunci : FORCLIME, Deforestasi, REDD+, *Demonstration Area*, DPMU.

ABSTRACT

Forests in Indonesia have the potential for flora, fauna, ecosystems and tropical forests. It turns out that this huge forest potential is still not paid enough attention by Indonesia. At least 286 million hectares of Indonesian forest experienced deforestation from 2001 to 2021. In that period West Kalimantan contributed 40% of deforestation in Indonesia. This deforestation can trigger climate change and threaten the existence of biodiversity and rural communities (indigenous people). Concerns about deforestation require strategic handling. Implementation of the FORCLIME Program is the answer to implementing REDD+ Mitigation in Indonesia. This research discusses the implementation of the FORCLIME program in dealing with deforestation in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan in 2019-2021?

This research uses qualitative research methods, with document data collection techniques (document analysis) sourced from books, international and national journals, official government and non-government documents, as well as news and press release activity. The research results show that the implementation of the FORCLIME Program is carried out at three levels. At the national level the strategy focuses on policies, strategies and institutional plans for forest management. At the regional level, providing advice regarding plans, REDD+ readlines, community and community-based forest management through DPMU. At the site/local level, it is an implementation activity Demonstration Area (DA). DA activities include conservation, land use management, increasing knowledge and sustainable community income and demonstration plot agroforestry.

Keywords: *FORCLIME, Deforestation, REDD+, Demonstration Area, DPMU.*

PENDAHULUAN

Hutan adalah kunci keberlangsungan kehidupan di bumi. UNEP mengungkapkan bahwa 75% air bersih berasal dari hutan. Hutan juga menjadi rumah bagi 80% dari keragaman hayati (*biodiversity*) yang ada di darat. Hutan mampu menyediakan 40% oksigen dan menyerap 4 Gtco₂ (miliar ton karbondioksida) per tahunnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, mulai dari keberagaman satwa dan tumbuhan, potensi hutan tropis hingga potensi hutan hujan. Indonesia memiliki jumlah tutupan lahan hutan sebesar 51,2%, setara dengan 96 juta hektar dari total 187 juta hektar luas daratan yang ada.¹

¹ KLHK News, "Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%," *PPID KLHK*, 27 Juni 2023, diakses 05 Agustus 2023.

Sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 Indonesia terus mengalami penurunan hutan 1% atau seluas 1.315.000 ha setiap tahunnya. Sejak tahun 2001 Indonesia telah kehilangan 286 juta hektar hutan.

Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan deforestasi terparah sepanjang dekade tersebut. Kalimantan Barat menyumbangkan 40% deforestasi yang terjadi di Indonesia pada periode tersebut. Bahkan, dalam skala global, deforestasi yang terjadi di provinsi tersebut setara dengan 13 total deforestasi global pada rentang 2002 hingga 2015.²

<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2023/06/27/1aju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84/>

² Global Forest Watch, "Perubahan Hutan: Kehilangan Hutan Primer di Kalimantan Barat, Indonesia," *Globalforestwatch.com*.

Terdapat lima kabupaten yang bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Kabupaten Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya dan Kapuas Hulu. Kapuas Hulu setidaknya memiliki 2,38 juta hektar hutan primer pada tahun 2001. Deforestasi yang terjadi telah membuat wilayah ini kehilangan hutan 100 ribu hektar hutan primer pada tahun 2015. Kehilangan tutupan pohon seiring dengan penurunan hutan primer tersebut mencapai 226 ribu hektar. Deforestasi tersebut menghasilkan emisi dengan total emisi yang dihasilkan mencapai 150 juta tCO₂e.³

Tingginya angka deforestasi yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu mayoritas disebabkan oleh konversi hutan yang dijadikan lahan pertanian. Umumnya perubahan lahan tersebut terjadi di sekitar pinggiran hitam dan sepanjang jalur sungai. Sedangkan perubahan lahan pada daerah pegunungan disebabkan oleh aktivitas antropogenik.⁴ Dari keseluruhan deforestasi yang terjadi sepanjang tahun 1990 hingga 2000, 72% di antaranya dikonversi menjadi lahan pertanian dan hanya 0,5% wilayah yang digantikan oleh perkebunan.

Mayoritas penurunan hutan yang terjadi di Kapuas Hulu disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, sedangkan kebakaran hutan tidak masif terjadi. Kebakaran hutan menyumbang 5,3% kehilangan tutupan hutan di wilayah ini.

Deforestasi terhadap hutan berarti hilangnya habitat keanekaragaman hayati.

³ Global Forest Watch, "Kehilangan Tutupan Pohon di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia Tahun 2002-2015," *Globalforestwatch.org*.
<https://gfw.global/3UBmASH>

⁴ Peter Navratil, "Telaah Situasi Penutupan Lahan Dan Perubahan Penutupan Lahan Di Kabupaten Kapuas Hulu Dan Malinau, Indonesia," *GIZ GmbH FORCLIME* (Jakarta, May 2013). Halaman 65
https://forclime.org/documents/Books/Telaah%20Situasi%20Penutupan%20Lahan_Final.pdf

Selama periode tersebut Area Keanekaragaman Hayati Penting di Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 10%. Hutan menjadi rumah bagi 80% hewan amfibi, 75% spesies burung dan 68% spesies mamalia. Keberadaan keragaman hayati merupakan pondasi bagi kesehatan bumi. Sebab keragaman hayati merupakan bagian dari rangkaian ekosistem yang membuat alam tetap stabil sesuai pada fungsinya. Hilangnya jutaan tutupan hutan mengancam keberadaan *biodiversity* di dunia.⁵

Hutan tidak hanya menjadi rumah bagi satwa fauna tetapi keanekaragaman flora juga mayoritas habitatnya berasal dari hutan. Lebih dari 25% tumbuhan obat-obatan berasal dari pohon yang tumbuh pada hutan tropikal. Di samping itu, lebih dari separuh jenis buah-buahan yang kita konsumsi juga diperoleh melalui pohon. Tidak heran bila beragam kebutuhan manusia bisa diperoleh melalui hutan.⁶

Bagi masyarakat adat, keberadaan hutan sudah seperti supermarket, dimana hampir seluruh kebutuhan mereka dapat diperoleh dari hutan.⁷ Sayangnya banyak hutan adat yang terancam akan dampak deforestasi. Deforestasi tersebut mengancam keberlangsungan berbagai aspek kehidupan bagi *indigenous people*.

Pertama, *indigenous people* terancam kehilangan tanah leluhur mereka yang sudah dijaga dari generasi ke generasi.

⁵ Madison Lemelin, "Devastating Thruths of Deforestation and How You Can Help," *Rainforesttrust.org*. 29 Januari 2020
https://www.rainforesttrust.org/our-impact/rainforest-news/devastating-truths-of-deforestation-and-how-you-can-help/?utm_source=google-grant-uk&utm_medium=search&utm_campaign=our-impact-uk&utm_term=rainforest%20deforestation&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwa1sb1BMzhPeT6jVu6OLbTgko7mqh1P4TIVJuU3WOchtZ1wkBcEKTDkqhAeBoCkJAQAvD_BwE

⁶ United Nation, "Save Forest Now."

⁷ Ibid

Hilangnya tanah leluhur dan hutan adat dapat mengancam budaya dan tradisi masyarakat adat, sebab banyak kegiatan spiritual, upacara adat dan upacara tradisional dari *indigenous people* bergantung pada alam.⁸

Mayoritas masyarakat adat menggantungkan perekonomiannya dari hasil alam yang diperoleh dari hutan. Deforestasi yang terjadi membuat masyarakat adat tidak memiliki alternatif sumber perekonomian lainnya. Hutan dapat menyediakan buah-buahan, sayur, obat-obatan, hewan untuk dikonsumsi dan lahan perburuan.

Penurunan wilayah hutan juga menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem yang bisa memicu timbulnya virus dan penyakit. Dalam beberapa kasus penyebaran wabah timbul karena rusaknya pertahanan alami dari hutan. Keberadaan *indigenous people* yang sangat dekat dengan alam dan pemukiman yang paling dekat dengan hutan, menjadi sangat beresiko untuk terserang penyakit.

Besarnya ketergantungan *indigenous people* terhadap alam dan hutan membuat mereka menjaga hutan dengan lebih baik. Keberadaan *indigenous people* merupakan pertahanan pertama dan perlindungan mutlak bagi hutan. Keberadaan *indigenous people* dan kelompok suku adat telah mengatur hukum pemanfaatan hutan dengan sangat baik. Penelitian juga mengungkapkan bahwa wilayah hutan yang dijaga dengan hukum adat mampu menyimpan stok karbon lebih banyak bahkan mencapai 34 miliar metrik ton karbon⁹.

Seperti halnya suku Dayak Iban yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki kearifan hukum adat yang sangat menghormati keberadaan alam. Suku

⁸ Alokya Kanungo, "The Silent Cry of the Forest : How Deforestation Impact Indigenous Communities."

⁹ Ibid.

Dayak Iban mengatur bahwa tidak semua hutan dijadikan ladang. Pemanfaatan hutan tersebut dilakukan secara berkala. Lahan yang selain hutan adat dimanfaatkan sebagai ladang digunakan untuk pertanian karet, tanaman buah, tengkawang yang menghasilkan minyak berkualitas tinggi.

Suku Dayak Iban tidak hanya sebatas pemanfaatan lahan tetapi juga berperan dalam melindungi satwa yang ada. Suku ini melarang perburuan orangutan (*Pongo pygmaeus*) karena dianggap merupakan nenek moyang Suku Dayak.¹⁰ Hukum adat suku ini melarang keras perburuan terhadap burung enggang. Burung enggang memiliki makna mendalam sebagai simbol ritual Dayak Iban. Bahkan aksesori bulu burung enggang yang digunakan saat Upacara Gawai Kenyalang hanya digunakan oleh tokoh tertentu. Salah satu tokoh Suku Dayak Iban, Apai Janggut menuturkan "Bagi Masyarakat Dayak Iban burung itu semacam jimat perlindungan untuk kami."¹¹

Kalimantan Barat sebagai penyandang predikat deforestasi tertinggi kedua di Indonesia memerlukan penanganan aksi strategis. Deforestasi tersebut harus segera dihentikan demi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati setempat, yang 'notabene' merupakan tempat masyarakat Dayak Iban menggantungkan hampir seluruh aspek kehidupannya.

Penanganan deforestasi ini hendaknya dilakukan dengan strategis, dimana melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pelestarian agar upaya pelestarian dapat terus berlangsung, dengan keinginan dan kesadaran masyarakat sendiri.

¹⁰ Forest and Climate Change Programme, "Inventarisasi Potensi Hutan untuk Hutan Desa di Karangas Bunut Kalimantan Barat," *Forclime.org*. 17 September 2013.

¹¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Cara Suku Dayak Menjaga Hutan Aseli Kalimantan*, Halaman 69.

Dalam skema REDD+ upaya penurunan emisi melalui konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan dilakukan untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini berarti kegiatan penurunan deforestasi dan degradasi tidak hanya sebatas konservasi tetapi mengarahkan perekonomian dan aktivitas masyarakat pada konsep *sustainable*. Masyarakat diharapkan bisa memperoleh manfaat dari keberadaan dan kelestarian hutan dan justru memperoleh peningkatan perekonomian dari kegiatan pengelolaan hutan lestari tersebut.

Untuk dapat melaksanakan mitigasi REDD+ tersebut tentunya membutuhkan dana, pengetahuan dan teknologi yang disusun dalam sebuah rencana strategis. Jerman sebagai negara yang sudah meratifikasi Protokol Kyoto dan *Paris Agreement* sebagai negara annex 1 memberikan kesempatan kerja sama pembiayaan kepada negara-negara berkembang yang ingin berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan memerlukan penanganan deforestasi mengusulkan kerja sama perubahan iklim kepada Jerman. Proposal kerja sama tersebut diusulkan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2007. Kedua negara berhasil menyepakati *Financing Agreement dan Separate Agreement* pada 19 November 2010.

Pada pertemuan Indonesia dan Jerman di Jakarta 14 November 2013, yang bertajuk “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*,” menghasilkan program yang *Programme on Response to Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies*. Kedua negara sepakat menerapkan skema REDD+ melalui *Technical Cooperation* (TC) dan berupa

Financial Cooperation (FC) dalam wadah kerja sama *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME). Program implementasi TC, memperoleh dukungan pembiayaan FC sebesar €22.100.000. dukungan pembiayaan tersebut disertai dengan syarat Indonesia turut memberikan *commitment fee* sebesar 10% dari total dana yang diberikan oleh Jerman.¹²

Proyek yang berhasil ditandatangani oleh kedua pihak pada 2013, yang menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 300.000-400.000 tCO₂e. Target pelaksanaan rancangan program tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 hingga 31 Desember 2020.

Pelaksanaan program FORCLIME ini dilakukan di beberapa Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Setiap provinsi terpilih memiliki 1 kabupaten yang menjadi daerah penerima manfaat dan menjadi daerah *Demonstration Activity* (DA). Pertama, Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau.

KAJIAN TEORI

Perspektif Liberalisme

Immanuel Kant dalam tulisannya yang berjudul *Perpetual Peace* (Perdamaian Abadi) menyebutkan dalam mengatasi masalah pasca Perang Dunia II, dibutuhkan suatu perdamaian yang terbentuk melalui federasi yang lebih leluasa yang terdiri atas negara-negara bebas yang menganut aturan hukum. Dalam hal ini negara tidak harus menjadi aktor utama dan konflik tidak lagi

¹² KemenpanRB, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Bagian Pengaduan Informasi dan Kepustakaan, *Dokumen-dokumen MOU dengan Beberapa Kementerian/Lembaga dan Beberapa Negara Sahabat: Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany*, 07 Januari 2015, No.274, Jakarta. Halaman 155-170.

mendominasi dalam hubungan internasional seiring meningkatnya kerja sama guna mengejar kepentingan bersama.¹³

Teori Kerja Sama Internasional

K.J Holsti menyebutkan bahwa kerja sama awalnya terjadi karena adanya berbagai masalah nasional, regional dan global yang memerlukan perhatian berbagai negara. Negara-negara dengan permasalahan yang sama kemudian melakukan pendekatan dengan membawa saran terkait penyelesaian masalah sehingga berujung pada negosiasi dan tawar-menawar. Tidak heran bila kerja sama internasional seringkali terjadi karena kesamaan tujuan (*common interest*). Kerja sama yang berlangsung antar negara biasanya juga disertai dengan seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur pelaksanaan rezim internasional.¹⁴

Salah satunya yaitu isu lingkungan yang menjadi permasalahan dunia terkait keamanan non-tradisional bagi suatu negara. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Hal inilah yang membawa Jerman dan Indonesia bekerjasama untuk menjaga jumlah emisi GRK dibawah level yang telah ditentukan melalui upaya penurunan angka deforestasi guna memastikan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5°C per 30 tahun.¹⁵

¹³ Jill steans dan Lily Floyd, 2009. “*International Relation: Perspective and Themes*.” Pearson Education Limited: Edinburgh. Hal 94-97

¹⁴ K.J Holsti, 1988. “*Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*.” Dalam Kusumowinahyu, Mahendra Pratama, *Analisa Kerja Sama Indonesia-Jepang melalui Joint Crediting Mechanism untuk Mengurangi Emisi Karbondi Indonesia Tahun 2014-2021*(Repository UKSW: Jawa Tengah. 2022). Halaman 7-8.

¹⁵ Sesilia Novita, “Kerja Sama Indonesia-Islandia dalam Pengembangan Energi Panas Bumi

Tingkat Analisis Negara Bangsa

Menurut Singer level analisis merupakan sebuah target analisis sehingga para peneliti bisa mendapatkan *deskriptif* atau gambaran, *explanation* atau penjelasan serta sebuah *prediction* atau dugaan maupun perkiraan yang tepat serta akurat tentang perilaku suatu negara.

Memilih aktor negara sebagai sebuah fokus ataupun level analisis menimbulkan pertanyaan terkait tujuan, motivasi dan niat dari kebijakan nasional. Ciri-ciri dari negara sebagai level analisis yaitu mereka bertindak atas nama bangsa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan yang konkrit. Negara akan membahas masalah tujuan dan hasil. Negara akan membahas masalah tujuan dan hasil. negara memilih tujuan dan berusaha untuk mewujudkannya dengan merumuskan strategi ataupun kebijakan.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, fokus untuk menganalisis dan menginterpretasi dokumen laporan kegiatan dan informasi dari KLHK untuk menemukan jalannya pelaksanaan implementasi Program FORCLIME selama pandemi COVID-19 dalam menurunkan laju deforestasi di Indonesia. Untuk menjelaskan penelitian tersebut penggunaan metode penelitian kualitatif dinilai sesuai dalam melaksanakan penelitian ini karena penelitian ini berusaha membangun konstruksi pemahaman mengenai implementasi program FORCLIME. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (document analysis) dengan sumber rujukan buku, jurnal internasional dan nasional, dokumen resmi pemerintah dan non-pemerintah, serta berita yang

(Geothermal) Tahun 2007-2017,” *eJournal Hubungan Internasional* 6, No.4, (2018). Halaman 1633.

¹⁶ Yessi Olivia, “Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional,” *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (2013): 896–914.

bersumber dari koran, majalah ilmiah, *press release* kegiatan. Penggunaan teknik dokumentasi ini karena kegiatan implementasi REDD+ melalui Program FORCLIME ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jerman merupakan negara dengan urutan keempat penghasil emisi GRK terbesar di dunia. Jerman bertanggung jawab untuk menurunkan jumlah emisi GRK serta wajib untuk melaksanakan program alih teknologi, donor dan pembiayaan. Berdasarkan kerangka kerja sama *Bali Plan Action*, yang telah ditetapkan oleh UNFCCC melalui COP-13 Jerman dituntut untuk mendorong negara berkembang dalam melaksanakan skema REDD+ sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim.

Indonesia menjadi negara yang potensial bagi Jerman untuk melaksanakan tujuan kerjasama pelestarian lingkungan guna menurunkan emisi GRK. Indonesia merupakan rumah bagi ekosistem keanekaragaman dengan tutupan lahan hutan mencapai 86-93 juta hektar. Lahan gambut tropis yang terdapat di Indonesia yang mencapai 21 juta hektar, dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya potensi hutan di Indonesia yang sangat besar tersebut masih belum dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh Indonesia.

Data World Resource Institute Indonesia (WRI Indonesia) juga menyebutkan, 55% penurunan hutan yang terus terjadi sejak awal tahun 2000 hingga 2015. Puncak penurunan tutupan lahan hutan terjadi pada tahun 2011 hingga 2012 dimana setidaknya ada 225 ribu hektar hutan primer yang hilang digantikan oleh perkebunan. Sebagian besar penebangan hutan tersebut terjadi di Kalimantan dan Papua.¹⁷

¹⁷ Asia Today.id, "Hari-hari Terakhir Hutan Kalimantan," 19 Januari 2021.

Hal ini membuat mitigasi harus segera dilakukan guna menurunkan angka deforestasi di Indonesia. Program Forest and Climate Change (FORCLIME) menjadi jawaban untuk upaya mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan program mitigasi ini mengungkap skema REDD+ dengan menerapkan sistem pendanaan yang berasal dari negara donor Jerman dan di implementasikan oleh Indonesia sebagai negara penerima donor. Mekanisme pelaksanaan program dilakukan melalui dua metode yaitu *financial cooperation* (FC) / kerjasama financial dan *technical cooperation* (TC)/ kerja sama teknis.

Tujuan dan Target Kerja Sama FORCLIME

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan menetapkan daerah yang menjadi target implementasi program *Demonstration Activity* (DA). Setiap DA memiliki program utama yang berbeda-beda tetapi secara umum terdapat *Strategic Areal*.

Target yang akan dicapai oleh masing-masing *Demonstration Activity* (DA) REDD+ pada akhir program FORCLIME FC adalah¹⁸:

- 1) Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 300.000 - 400.000 ton CO₂eq dibandingkan emisi GRK tanpa ada intervensi program FORCLIME/Business as Usual (BAU).
- 2) Setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD mencapai dampak sosial ekonomi yang

<https://asiatoday.id/read/hari-hari-terakhir-hutan-kalimantan>

¹⁸ Renate Kirsch, Elke Siehl, and Albrecht Stockmayer, "Challenges and Opportunities for Implementing Financing Mechanisms for Climate Change Mitigation Guided by Principles of Good Financial Governance : The Case of Indonesia," in *Transformation, Politics and Implementation: Smart Implementation in Governance Programs*, 2017, 303–24, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv941tdt.17>.

positif pada tingkatan program dan kelompok sasaran.

- 3) Perbaiki pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program Mitigasi FORCLIME

- 1) GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GIZ merupakan sebuah perusahaan internasional Jerman yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan yang tersebar di berbagai negara di dunia. Dalam hal ini GIZ memiliki peranan sebagai perwakilan pemerintah Federal Jerman dalam melakukan pendampingan selama penyusunan dan adaptasi regulasi tata kelola dan reformasi skema kehutanan masyarakat. Dalam konteks hubungan pada level nasional, provinsi, dan kabupaten, Keberadaan advisor internasional GIZ membantu memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengelola dan memonitor hutan.¹⁹

- 2) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Development Bank)

Dalam hal ini KfW memiliki peranan penting untuk menyediakan dana terhadap proses implementasi program yang sudah dirancang.

- 3) Bappenas (Badan Pengelola Pembangunan Nasional)

Hadirnya perbincangan tentang program ini merupakan sebuah hasil usulan yang disampaikan oleh Bappenas kepada pihak pemerintah Jerman. Dengan adanya usulan proyek tersebut, pemerintah Jerman

mempertimbangkan untuk membentuk kerjasama

- 4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam pelaksanaan program Forclime ini pemerintah Indonesia diwakili oleh KLHK sebagai lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan kata lain KLHK berperan sebagai Program Executing Agency (PEA). Setiap tahunnya laporan dari pelaksanaan program yang dibuat oleh Forclime diserahkan kepada KLHK.

- 5) District Programme Management Unit (DPMU)

Pelaksanaan kegiatan REDD+ yang sudah dirancang melalui program FORCLIME dilaksanakan pada tiga tingkatan yaitu Nasional (NPMU), Kabupaten (DPMU), dan lokal (*Forest Management Unit*). Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.25/ Menhut-II/2012 sebagian unit pemerintahan bidang kehutanan (Dinas KLHK) terlibat secara langsung dalam proses inventarisasi DA melalui pembentukan DPMU.

Kehadiran DPMU pada tingkat DA untuk menghormati keberadaan masyarakat desa sebagai suatu kelompok yang memiliki hak asal-usul, hak tradisi, dan wewenang hukum adat. Melalui DPMU, pelaksanaan DA dapat dipantau dengan lebih baik. Pada DPMU juga terdapat posisi strategis bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif sebagai Fasilitator Kampung.

Peraturan Pengelolaan Anggaran Program FORCLIME

¹⁹ FORCLIME. "Kerja Sama Teknis: Pendekatan GIZ." <https://www.forclime.org/id/tentang-tc>

Untuk melaksanakan Program FORCLIME, Jerman berkomitmen melalui *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW) memberikan pendanaan sebesar 20 juta euro sebagai dana Hibah Luar Negeri (HLN). Pemberian dana tersebut disertai dengan syarat bahwa Indonesia turut berkomitmen memberikan pendanaan sebesar 10% dari dana yang telah diberikan Jerman dan tergolong sebagai Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Pelaksanaan program berlangsung di Pulau Kalimantan dengan menysasar tiga kabupaten pada tiga provinsi, sehingga ketentuan pengelolaan anggaran diatur berdasarkan ketentuan APBN. Penggunaan dan pengelolaan anggaran yang diperoleh melalui dana hibah dalam Program FORCLIME mengikuti aturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.05/2011. Sedangkan untuk pencairan dana hibah dilaksanakan sesuai regulasi KfW No. 2007 66 089 KfW Jerman “*KfW Guidelines for the procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries.*” Sedangkan aturan pengadaan barang/jasa yang sumber anggarannya berasal di rupiah murni pendamping (RMP) berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁰

Implementasi FORCLIME terhadap Pengelolaan Hutan di Kapuas Hulu

Implementasi kegiatan mitigasi REDD+ yang dijalankan oleh FORCLIME berusaha memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan peranan kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan masyarakat adat. FORCLIME mendukung keberadaan masyarakat adat dengan turut memfasilitasi pengelolaan hutan bersama.

²⁰ Menteri Kehutanan RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD” (2012).

Di samping keinginan untuk mengurangi deforestasi, pelaksanaan program mitigasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Implementasi kegiatan FORCLIME dibagi atas empat area strategis, yaitu:

- Bidang strategis 1 : pengelolaan kebijakan kehutanan, perencanaan strategis, dan pengembangan kelembagaan.
- Bidang strategis 2 : pengelolaan hutan berkelanjutan
- Bidang strategis 3 : pengembangan sumber daya manusia,
- Bidang strategis 4 : pengelolaan terpadu konservasi keanekaragaman hayati dan daerah aliran sungai di Lore Lindu.

1) Kerangka Kebijakan Kehutanan di Tingkat Nasional, Daerah maupun Tapak

Implementasi kegiatan FORCLIME dilakukan dengan menggunakan Jurisdictional Approach atau pendekatan hukum. daerah DA diatur secara hukum melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.25/ Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Unit Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Demonstration Activities REDD+.²¹

2) Penurunan Deforestasi dan Degradasi serta Pengurangan Emisi Karbon

Pada kedua DA #2 dan #8 deforestasi tertinggi terjadi pada rentang tahun 2012-2013 dengan total 332,22 hektar. Hingga tahun 2019 tren penurunan deforestasi relatif berlanjut pada DA#8, sedangkan

²¹ Menteri Kehutanan RI.

DA#2 kembali mengalami kenaikan sebesar 8,93 hektar Pada tahun 2019-2020 tidak terjadi deforestasi pada DA#2 maupun DA#8.²² Penurunan emisi karbon pada DA#2 dan DA#8 dapat dikatakan berjalan dengan baik. emisi karbon yang terserap oleh DA#2 mencapai 293.142,68 tCO₂e. Untuk DA#8 emisi karbon yang berhasil diserap oleh DA#8 sebesar 352.804,91 tCO₂e.²³

3) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang pertama dengan mendorong (*Participatory Land Use Planning/ PLUP*) dengan mengklasifikasi wilayah desa melalui pembagian area perumahan, fasilitas umum, kebun, ladang, demplot hortikultura dan investasi kegiatan lainnya. Pada area DA REDD+ tersebut dilaksanakan patroli hutan berbasis masyarakat hingga 4 kali setahun bersama mencatat setiap satwa maupun flora langka yang berhasil dijumpai.²⁴

4) Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

FORCLIME mendorong pengajuan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Langkah selanjutnya menetapkan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Masyarakat bersama FORCLIME mengembangkan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu hutan, madu kelulut, rotan,

bambu, aren, dan tanaman pewarna alami untuk tenun.²⁵

Kegiatan lainnya yang difasilitasi oleh program FORCLIME berupa agroforestry, silvofishery, silvopastura dan pengembangan pondok belajar. FORCLIME juga mendorong reboisasi hutan dengan melakukan penanaman tumbuhan dan buah-buahan lokal pada DA#2 dan DA#8 tahun 2019. FORCLIME juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan setiap partisipasi program, dimana setidaknya terdapat partisipasi perempuan sebesar 30%.²⁶

Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Program FORCLIME

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat global, dimana dapat terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan ketersediaan kebutuhan bagi generasi mendatang. Prinsip yang dipegang oleh SDGs yaitu: menjamin pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman, menggunakan pendekatan integratif yang mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, dan menggunakan perspektif jangka panjang.²⁷

Kehadiran FORCLIME yang sejalan dengan pemerintahan nasional maupun global tentunya mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia secara penuh. Tidak hanya sejalan tentang konservasi tetapi juga sejalan dengan target positif untuk

²²NPMU FORCLIME FC, "Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module Tahun 2020" (Jakarta, 2021).

²³ Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "LAPORAN TAHUNAN FORCLIME FC MODULE 2021" (Jakarta, 2021).

²⁴ Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

²⁵ Harry Surjadi and Titik Kartitiani, *Kisah Dari Tepi: Catatan Tentang Penerapan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (FORCLIME) Di Kalimantan Dan Sulawesi* (Jakarta: (GIZ) GmbH FORCLIME, 2020).

²⁶ NPMU FORCLIME FC, "Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module 2021" (Jakarta, 2021).

²⁷ Bappenas. "Indikator Tujuan Sustainable Development Goals," <https://sdgs.bappenas.go.id/metadana-indikator-sdgs/>

pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari 17 tujuan pembangunan dalam SDGs, kegiatan FORCLIME berkontribusi menjalankan 7 tujuan SDGs.²⁸

- Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

Pengembangan perekonomian berkelanjutan. Pengembangan produksi HHBK. Percontohan agroforestry, silvofishery, silvopastura serta penanganan konflik tenurial²⁹. Pelaksanaan baseline survey sosial ekonomi untuk mengetahui kondisi masyarakat di awal dan di akhir tahun pelaksanaan.³⁰

- Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

Mengembangkan produk agroforestry, silvofishery, silvopastura dan HHBK berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk memastikan rantai pasokan konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Inveritasi kegiatan Demonstration Plot (Demplot) yang mengusung konsep Participatory Land Use Planning (PLUP).³¹

²⁸ FORCLIME. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan raih SDGs Action Award 2022 sebagai Pemenang Terbaik I Kategori Kementerian/Lembaga Pusat,” 16 Desember 2022. <https://www.forclime.org/index.php/id/pencapaian?start=3>

²⁹ Agus Wibowo et al., “Berbagi Pembelajaran Dari Inisiasi Program FORCLIME FC Module: Mengembangkan Ekonomi Lokal Dan Keberlanjutan Sumberdaya Alam Di Tingkat Tapak,” *FORCI Development, Fakultas Kehutanan IPB* (Bogor, January 2019).

³⁰ Peter Mackay and Edy Marbyanto, “Village Socio-Economic Baseline in Kapuas Hulu District Survey Report of Villages in the Surrounding FMU of Kapuas Hulu,” *GIZ GmbH FORCLIME* (Jakarta, 2013).

³¹ Surjadi and Kartitiani, *Kisah Dari Tepi: Catatan Tentang Penerapan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (FORCLIME) Di Kalimantan Dan Sulawesi*.

- Tujuan 5 : Kesetaraan Gender (Gender Equality)

FORCLIME FC selalu melibatkan paling tidak 30% kehadiran perempuan untuk menjamin kelompok perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya, memperoleh manfaat dan dapat mengambil keputusan dalam kegiatan pembangunan.

- Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)

Pembentukan dan fasilitasi Kelompok Usaha Pertanian Sosial (KUPS), pengembangan pondok belajar dan program pelatihan monitoring dan pengelolaan hutan.³²

- Tujuan 10 : Pengurangan kesenjangan (Gini Ratio)

Dampak dari implementasi kegiatan FORCLIME ini berhasil membuat 4 desa dalam kategori Sejahtera, 8 desa dalam kategori tertinggi.³³

- Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)

Upaya penurunan deforestasi pada DA#2 dan DA#8. Penanaman pohon dengan tanaman khas lokal dan monitoring hutan bersama masyarakat. Penurunan emisi gas rumah kaca pada DA#2 hingga 293.142,68 tCO₂e dan DA#8 352.804,91 tCO₂e.

- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan (Life on Land)

Salah satu dampak deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat yaitu penurunan 10% keanekaragaman hayati. Dalam hal ini FORCLIME

³² NPMU FORCLIME FC, “Laporan Tahunan FORCLIME FC Module 2019” (Jakarta, 2020).

³³ NPMU FORCLIME FC, “Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module 2021.”

berusaha memastikan keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada melalui program Biodiversity Monitoring System.³⁴

SIMPULAN

Program FORCLIME dilaksanakan melalui tiga lingkup struktur. Pada Level nasional strategi berfokus pada kebijakan, strategi dan rencana kelembagaan pengelolaan hutan. Pada tingkat regional memberikan saran terkait rencana, REDD+ readlines, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan komunitas melalui DPMU. Pada tingkat tapak/ lokal, merupakan kegiatan implementasi *Demonstration Area* (DA). Kegiatan pada DA berupa konservasi, manajemen penggunaan lahan, peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan dan *demonstration plot agroforestry*.

Target yang akan dicapai oleh masing-masing *Demonstration Activity* (DA) REDD+ pada akhir program FORCLIME FC adalah:

- 1) Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 300.000 - 400.000 ton CO₂eq dibandingkan emisi GRK tanpa ada intervensi program FORCLIME/Business as Usual (BAU).

Terlaksana dengan baik pada kabupaten Kapuas Hulu dengan penurunan emisi pada DA#2 298 ribu ton emisi dan DA#8 mencapai 350 ribu ton penurunan emisi

- 2) Setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD mencapai dampak sosial ekonomi yang positif pada tingkatan program dan kelompok sasaran.

Masyarakat dapat mengatasi konflik tenurial melalui bantuan serta layanan

penyelesaian konflik. Adanya peraturan perundang-undangan untuk perlindungan hak masyarakat adat atas tanah adat mereka. Program percontohan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan hasil hutan, pelestarian hutan serta *demonstration plot* untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menggunakan lahan yang luas.

- 3) Perbaiki pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Adanya saran serta masukan secara langsung terkait kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari (PHL) pada berbagai tingkatan. Pada tingkat nasional berupa saran perturan regulasi melalui KLHK, Pada tingkat regional penetapan peraturan mengenai batas-batas wilayah melalui Kepala Dinas LHK dan Peraturan Bupati. Pada tingkat lokal adanya pelatihan edukasi dan keterlibatan masyarakat secara langsung saat pelaksanaan patroli dan mitigasi. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dampak jangka panjang dari program

Kegiatan yang dilaksanakan oleh *Forest and Climate Change* ini merupakan suatu skema pengelolaan hutan yang sangat menarik. Kegiatan tidak hanya terpaku pada upaya penurunan angka deforestasi dan emisi karbon melainkan turut memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini bagian dari investasi jangka panjang dengan mengedukasi masyarakat tentang percontohan pengelolaan hutan berkelanjutan tanpa mengurangi potensi ekonomi dan perolehan manfaat melalui hasil hutan yang lestari.

Implementasi program yang menghormati nilai adat, hak masyarakat adat serta hak perempuan merupakan cara yang paling tepat untuk bisa berbaur demi mengedukasi masyarakat.

³⁴ FORCLIME, "Kapuas Hulu as a Sustainable Landscape" (Forest and Climate Change Programme, 2020).

Referensi

- Asia Today.id, "Hari-hari Terakhir Hutan Kalimantan," 19 Januari 2021. <https://asiatoday.id/read/hari-hari-terakhir-hutan-kalimantan>
- Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. "LAPORAN TAHUNAN FORCLIME FC MODULE 2021." Jakarta, 2021.
- FORCLIME. "Kapas Hulu as a Sustainable Landscape." Forest and Climate Change Programme, 2020.
- Kusumowinahyu, Mahendra Pratama, *Analisa Kerjasama Indonesia-Jepang melalui Joint Crediting Mechanism untuk Mengurangi Emisi Karbondioksida di Indonesia Tahun 2014-2021*(Repository UKSW: Jawa Tengah. 2022). Halaman 7-8.
- Mackay, Peter, and Edy Marbyanto. "Village Socio-Economic Baseline in Kapuas Hulu District Survey Report of Villages in the Surrounding FMU of Kapuas Hulu." *GIZ GmbH FORCLIME*. Jakarta, 2013.
- NPMU FORCLIME FC. "Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module 2021." Jakarta, 2021.
- . "Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module Tahun 2020." Jakarta, 2021.
- . "Laporan Tahunan FORCLIME FC Module 2019." Jakarta, 2020.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (2013): 896–914.
- Surjadi, Harry, and Titik Kartitiani. *Kisah Dari Tepi: Catatan Tentang Penerapan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (FORCLIME) Di Kalimantan Dan Sulawesi*. Jakarta: (GIZ) GmbH FORCLIME, 2020.
- Wibowo, Agus, Hangga Prihatmaja, Aswita Lewenussa, Elvara Dwi Satria, and Ilham M. Fauzan. "Berbagi Pembelajaran Dari Inisiasi Program FORCLIME FC Module: Mengembangkan Ekonomi Lokal Dan Keberlanjutan Sumberdaya Alam Di Tingkat Tapak." *FORCI Development, Fakultas Kehutanan IPB*. Bogor, January 2019.